

# Template\_ICEMSS-1.docx

*by* Damaris Gupta

---

**Submission date:** 03-Sep-2025 09:30AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 2681220068

**File name:** Template\_ICEMSS-1.docx (2.62M)

**Word count:** 5479

**Character count:** 37716

# Implementasi Sistem Informasi Desa Dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kendalpecebean Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Cantika Alif Putri<sup>1</sup>, Ilmi Usrotin Choiriyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>University Of Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia

<sup>2</sup>University Of Muhammadiyah Sidoarjo, Sidoarjo, Indonesia



DOI: -

## Sections Info

### Article history:

Submitted: November 23, 2022

Final Revised: January 11, 2023

Accepted: January 16, 2023

Published: January 31, 2023

### Keywords:

First keyword

Second keyword

Third keyword

Fourth keyword

Fifth keyword

## ABSTRACT

**Objective:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) dalam meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Kendalpecebean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. **Method:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. **Results:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa SID berkontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, pelayanan publik dan efisiensi administrasi desa. Namun, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya memahami teknologi, serta belum optimalnya penyusunan standar operasi prosedur (SOP). Implementasi kebijakan dianalisis menggunakan teori Erward III yang mencakup indikator komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. **Novelty:** Temuan penelitian menunjukkan meskipun infrastruktur dan komitmen pelaksana sudah mendukung, pelatihan, penyusunan SOP serta upaya peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap SID masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah daerah agar penerapan SID semakin optimal dalam tata kelola desa.

## INTRODUCTION

Sebagai entitas yang memiliki otonomi, desa dapat mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pelaksanaan layanan publik di wilayah administratifnya. Pelayanan tersebut mencakup penyediaan barang dan jasa publik serta pelayanan administratif[1]. Pelayanan publik berbentuk barang mencakup penyediaan sarana dan prasarana desa, misalnya pembangunan jalan dan jembatan. Adapun pelayanan publik berbasis jasa meliputi berbagai program pemerintah desa, seperti pendampingan bagi UMKM serta penyediaan layanan kesehatan untuk masyarakat kurang mampu. Sementara itu, pelayanan administratif merupakan bentuk layanan wajib yang diselenggarakan pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang bertujuan melindungi individu, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Sebagai penyelenggara layanan, pemerintah desa harus mempersiapkan berbagai aspek untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, yang meliputi penyediaan fasilitas pelayanan publik, penempatan SDM yang kompeten, serta penyusunan dan penetapan standar pelayanan[2].

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah saat ini memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan pedesaan dengan mengalokasikan dana desa sebesar 10% dari APBN, sehingga pemerintah mewajibkan setiap desa untuk mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID)[3]. SID adalah sebuah platform yang digunakan untuk mengelola berbagai data yang ada di desa[4]. SID memuat informasi terkait data penduduk, layanan publik, produk hukum dan informasi tentang kegiatan dan program desa yang dikelola oleh pemerintah desa[5]. Penerapan

Sistem Informasi Desa (SID) meningkatkan efisiensi administrasi desa melalui integrasi data penduduk, keuangan dan pelayanan secara elektronik. Hal ini meminimalkan proses manual yang lambat dan rawan kesalahan, sehingga pengolahan data menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dalam penggunaan sumber daya[6]

Pembuatan website desa (SID) menjadi langkah awal dalam mengembangkan *e-government*, dengan tujuan memberikan akses informasi dan layanan kantor pemerintah desa kepada masyarakat. Penerapan sistem *e-government* di Indonesia diatur dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Government*. Impres tersebut menetapkan bahwa setiap lembaga pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun daerah wajib merancang, mengembangkan dan menerapkan konsep *e-government* di masing-masing instansi, terutama dalam hal penyediaan informasi kepada publik[7]. Melalui Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong penerapan tata kelola pemerintahan desa yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi. *E-government* adalah sistem yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai instansi pemerintah serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi yang dibutuhkan. Kehadiran *e-government* diharapkan dapat semakin memperkuat organisasi dan manajemen pemerintahan serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi[8].

Perkembangan era demokrasi menuntut adanya keterbukaan informasi bagi masyarakat, sehingga pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pada awal pelaksanaannya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dimaksudkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, juga dikenal sebagai *good governance*[9]. Penerapan prinsip *good governance* yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diwujudkan dalam pelayanan publik khususnya di bidang administrasi, yang menunjukkan perkembangan era globalisasi dan digitalisasi melalui penerapan teknologi canggih dalam tata kelola pemerintahan. Sejak tahun 2010, setiap instansi pemerintahan dan organisasi publik diwajibkan menyediakan situs web resmi sebagai bentuk implementasi *good governance*. Keterbukaan informasi publik semakin digalakkan setiap tahun seiring dengan perkembangannya. Hal utama untuk mewujudkan negara yang terbuka adalah dengan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengakses informasi. Semakin terbuka sebuah badan publik, maka badan publik tersebut akan dinilai semakin baik pertanggungjawabannya[10]. Banyak lembaga pemerintah di tingkat pusat yang memiliki website resmi dengan domain .go.id. Keterbukaan informasi publik tidak hanya diterapkan dipemerintahan pusat, tetapi juga diterapkan pada lingkup daerah, baik ditingkat provinsi, kabupaten atau kota. Implementasi keterbukaan informasi publik meluas hingga ke unit pemerintahan terendah yakni desa, dengan tujuan memberikan kemudahan akses informasi bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penerapan keterbukaan informasi publik mulai dilaksanakan pada level desa sejak tahun 2014.

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (*e-government*) menjadi langkah penting dalam mendukung terwujudnya *smart city*. Melalui penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), proses pelayanan publik dapat diselenggarakan secara lebih efisien, tepat sasaran, serta transparan. Konsep *smart city* ini bertujuan menciptakan interaksi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat, sehingga aspirasi dan

kebutuhan warga dapat terpenuhi melalui pelayanan yang efisien, adaptif dan saling terhubung[11]. Dalam rangka mewujudkan smart city, Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 yang mengatur tata kelola teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari implementasi e-government. Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sidoarjo yang telah menerapkan Peraturan Bupati tersebut dengan mengembangkan Sistem Informasi Desa (SID). Sistem ini dapat diakses melalui [www.kendalpecabean.com](http://www.kendalpecabean.com) untuk mempermudah pelayanan dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien.



**Gambar 1.** Halaman Depan Sisten Informasi Desa Kendalpecabean Kecamatan Candi  
*Sumber: [www.kendalpecabean.com](http://www.kendalpecabean.com), 2025*

Berdasarkan Gambar 1, halaman utama website Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, menampilkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dirancang untuk mendukung praktik tata kelola pemerintahan yang baik. Sistem ini memanfaatkan teknologi informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya SID di Desa Kendalpecabean, masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi desa melalui website resmi, yang mencakup data kependudukan, kondisi sosial, aktivitas desa hingga informasi keuangan yang selalu terbaru. Sistem informasi desa memiliki berbagai manfaat, salah satunya adalah hasil pengolahan data secara statistik yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam merumuskan dan menyempurnakan kebijakan, strategi serta program bagi penyelenggara dan pelaksana pemerintah desa. Selain itu, sistem ini juga mendukung peningkatan kualitas sumber daya pelaksana kebijakan serta mendukung pembangunan di wilayah pedesaan.



**Gambar 2.** Data Statistik Pengunjung Website SID Desa Kendalpecabean Tahun 2022-2024  
*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

<sup>2</sup> Berdasarkan data grafik diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 Desa Kendalpecabean memiliki Sistem Informasi Desa (SID) yang sudah dikunjungi 63.607 kali. Jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023, Sistem Informasi Desa mencatat 47.236 pengunjung. Angka tersebut juga jauh melampaui jumlah pengunjung pada tahun 2022 yang relatif rendah, yaitu 2.674 pengunjung. Terlihat secara jelas bahwa Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean memegang peran penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Peningkatan jumlah pengunjung mencerminkan bahwa SID berperan sebagai pilar utama dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di desa.

Desa Kendalpecabean, yang terletak di Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena alasan tertentu. Pelaksanaan Sistem Informasi Desa tidak terlepas dari hambatan yang dihadapi oleh pemerintah desa dan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kapasitas sumber daya manusia, baik dari sisi pengelola maupun penerima informasi. Hasil observasi di lapangan mengenai penerapan SID di Desa Kendalpecabean menunjukkan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa. Permasalahan utama yang dihadapi adalah tidak semua aparatur desa menguasai teknologi informasi dengan baik, sehingga mengalami kesulitan dalam mengelola Sistem Informasi Desa (SID). Permasalahan kedua yang dihadapi adalah ketidakpercayaan warga dalam memberikan data pribadi mereka kepada pemerintah desa. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa data tersebut dapat disalahgunakan, seperti digunakan untuk mengaktifkan pinjaman online tanpa sepengetahuan mereka. Jika kendala-kendala tersebut tidak segera diatasi, maka potensi besar yang ditawarkan oleh transformasi digital dalam pemerintahan desa akan sulit untuk diwujudkan[12].

Permasalahan yang muncul di Pemerintah Desa Kendalpecabean sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Untuk Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Titis Ayu Angganten pada tahun 2024 yang berjudul "Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik di Desa Tapak Kabupaten Magetan". Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hambatan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Tapak, yaitu sumber daya manusia (SDM) masih belum memadai, terlihat dari riwayat pendidikan serta rata-rata usia perangkat desa yang sudah lanjut. Kondisi seperti ini dapat menjadi penghambat dalam pengelolaan situs web resmi dan kelancaran penyebaran informasi secara daring. Namun, dengan perekrutan perangkat baru, kini muncul harapan baru untuk menghadirkan pembaruan dalam pengelolaan digital desa[13].

Kedua, pada tahun 2024 Muhammad Hamdi Mutazir, Toto Kushartono dan Bayu Septiansyah melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang". Dalam implementasi SID di Desa Warung Bambu hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya sosialisasi terkait SID oleh pemerintah Desa Warung Bambu, serta ketidakjelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat. Selain itu, tidak semua petugas memiliki pemahaman yang memadai tentang SID akibat keterbatasan usia dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini

menyebabkan kesulitan dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan sistem[14].

Yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Arief Setyawan, Achluddin Ibnu Rochim dan Bambang Kusbandrijo pada tahun 2022 yang berjudul "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur". Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dalam pelayanan publik di Pemerintah Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung masih belum optimal karena pelaksanaannya belum efektif. Penggunaan SID dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat yang meliputi keterbatasan keahlian atau pemahaman teknologi akibat kurangnya pelatihan yang tersedia, serta minimnya sumber daya manusia di Kantor Desa Wonokerto dalam mengoperasikan SID[15].

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul dalam implementasi Sistem Informasi Desa (SID). Landasan teori yang digunakan adalah teori implementasi Edward III, yang terdiri atas indikator komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi.

## RESEARCH METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Lokasi penelitian berada di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, dengan pertimbangan untuk menganalisis tantangan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi di lapangan serta melakukan wawancara dengan perangkat desa setempat. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan langsung serta wawancara, sementara data sekunder bersumber dari dokumentasi dan kajian literatur yang relevan.

Teknik pengambilan informan dilakukan secara purposive sampling dengan melibatkan kepala desa dan perangkat desa sebagai informan utama. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman, yang meliputi empat tahapan inti. Pertama, pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, observasi dan wawancara selama proses penelitian berlangsung. Kedua, reduksi data dilakukan untuk merangkum, memfokuskan serta mentransformasikan data yang telah dikumpulkan, dimulai sejak peneliti menentukan fokus wilayah penelitian. Ketiga, penyajian data dilakukan secara sistematis dan logis agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Keempat, penarikan kesimpulan dilakukan dengan mencatat, menguraikan, serta mengelompokkan data berdasarkan berbagai proporsi sehingga dapat menghasilkan kesimpulan dari temuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada penerapan Sistem Informasi Desa (SID) dengan menggunakan kerangka teori Edward III, yang menekankan empat indikator utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

## RESULTS AND DISCUSSION

Saat ini, Pemerintah Desa Kendalpecabean tengah menerapkan Sistem Informasi Desa, yaitu penerapan teknologi berbasis komputer yang digunakan untuk mengatur dan

menelola data serta aktivitas administrasi di kantor desa. Peran penting sistem ini terlihat dalam mendukung aktivitas pemerintahan desa, seperti pengelolaan aset, pengelolaan keuangan desa dan pelayanan kepada masyarakat. Keunggulan utama dari sistem ini adalah mendorong terciptanya kinerja yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di kantor desa. Di sisi lain, masyarakat memperoleh kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai desa mereka. Berdasarkan isinya, Sistem Informasi Desa (SID) mencakup beberapa fitur berikut :

1. Profil Desa (sejarah desa, profil wilayah desa, profil masyarakat desa dan profil potensi desa)
2. Data Desa (data wilayah administratif, data pendidikan dan data pekerjaan).
3. Layanan administrasi desa dan informasi terkait dengan pemerintahan, pembangunan desa, serta pengembangan kawasan perdesaan.



**Gambar 3.** Menu Layanan pada Website Sistem Informasi Desa Kendalpecabean  
*Sumber: [www.kendalpecabean.com](http://www.kendalpecabean.com), 2025*

Dalam rangka memahami <sup>34</sup> penerapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo terdapat sejumlah aspek yang perlu diperhatikan berdasarkan teori Implementasi. Dalam kajian ini, penulis mengacu pada teori Erward III, yang menyatakan bahwa terdapat empat indikator utama dalam proses implementasi. Keempat indikator tersebut, sebagai berikut :

1. Komunikasi, dengan indikator :
  - a. Tranmisi (penyaluran informasi)
  - b. Kejelasan Penyampaian Informasi
  - c. Konsistensi
2. <sup>32</sup> Sumber Daya, dengan indikator :
  - a. Sumber Daya Manusia (SDM)
  - b. Sumber Daya Non-Manusia
3. Sikap Pelaksana, dengan indilator :
  - a. Karakteristik Pelaksana (sikap pelaksana kebijakan)
4. Struktur Birokrasi, dengan indikator :
  - a. SOP (mekanisme kerja)
  - b. Fragmentasi (penyebaran tanggung jawab)

#### **Komunikasi**

Komunikasi memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana informasi kebijakan disampaikan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan, serta bagaimana mereka menanggapi kebijakan tersebut. Disamping itu, komunikasi antar lembaga juga memainkan peran penting dalam proses penyebaran mapun perubahan terkait kebijakan publik. Dalam pelaksanaan kebijakan, aspek penting

dalam komunikasi yang harus diperhatikan adalah cara penyampaian serta kejelasan isi pesan. Menurut George C. Erward III sebagaimana dikutip oleh Deddy Mulyadi (2018:68), keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan tergantung pada pemahaman pelaksana terhadap apa yang harus mereka lakukan.

Komunikasi yang efektif sangat penting dalam menunjang keberhasilan penarapan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean. Melalui komunikasi yang jelas, para pelaksana dapat memahami kebijakan serta peraturan yang berlaku secara akurat. Dengan demikian, kebijakan dan aturan teknis terkait Sistem Informasi Desa (SID) diharapkan dapat diterapkan secara konsisten sesuai dengan tujuan awal perencanaannya. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang akan diterapkan perlu disampaikan secara efektif dan jelas, sehingga dapat dilaksanakan secara konsisten dan selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan sejak awal.

#### 1. Tranmisi

Peran penting dalam pelaksanaan kebijakan terletak pada bagaimana informasi disampaikan oleh pihak pelaksana. Pada penerapan SID di Desa Kendalpecabean, kelompok masyarakat menjadi target utama dari penyampaian informasi tersebut. Komunikasi yang dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Hal ini disampaikan oleh Mochamad Junaidi selaku Operator SID pada tanggal 11 April 2025 sebagaimana berikut:

*"Pada saat itu, setelah masa jabatan Kepala Desa Kendalpecabean berakhir, akan dilaksanakan pemilihan Kepala Desa. Dalam proses tersebut saya diminta untuk melakukan pemutakhiran data, dalam momen tersebut sekaligus saya manfaatkan untuk mensosialisasikan pentingnya data dalam Sistem Informasi Desa kepada masyarakat".*

Penyaluran informasi yang baik dan tepat sangat penting untuk memastikan bahwa para pelaksana atau implementator memiliki pemahaman yang jelas mengenai kebijakan yang akan dijalankan. Dengan demikian, proses implementasi dapat berlangsung secara optimal. Sebaliknya, kurangnya pemahaman dari para implementator terhadap kebijakan yang akan diterapkan dapat menghambat keberhasilan pelaksana kebijakan tersebut, hal ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap pelaksanaan program serta kualitas layanan kepada masyarakat.



**Gambar 4.** Dokumentasi Sosialisasi SID Kepada Masyarakat  
*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

#### 2. Kejelasan

Pemahaman yang jelas dari para pelaksana mengenai isi suatu kebijakan memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Dalam konteks Implementasi Sistem Informasi Desa (SID), sangat penting bagi para pelaksana untuk

memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara menggunakan berbagai fitur yang tersedia dalam Sistem Informasi Desa (SID) berbasis web. Jika pelaksana kurang memahami fitur-fitur tersebut, hal ini bisa menjadi kendala bahkan memperlambat proses implementasi kebijakan serta pelayanan masyarakat.

**Tabel 1.** Pemahaman Perangkat Desa terkait SID

Indikator	Jumlah Pelaksana (Operator SID)
Memahami	1
Belum Memahami	2

*Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Berdasarkan tabel yang disajikan, tampak bahwa para pelaksana kebijakan belum sepenuhnya memahami Sistem Informasi Desa (SID). Kondisi ini mengindikasikan bahwa mereka belum memiliki kesiapan dan informasi yang memadai mengenai mekanisme implementasi SID. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak penanggung jawab untuk menyampaikan informasi kebijakan secara jelas agar pemahaman para pelaksana terhadap kebijakan tersebut dapat meningkat. Selain itu, pelatihan atau bimbingan teknis juga perlu diberikan kepada para pelaksana kebijakan agar mereka dapat menguasai aplikasi yang digunakan dalam penerapan Sistem Informasi Desa (SID).

### 3. Konsistensi

Keberhasilan suatu kebijakan atau program sangat dipengaruhi oleh konsistensi dalam penerapan aturan. Ketika aturan diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah, para pelaksana kebijakan di lapangan akan lebih mudah memahami dan menjalankannya. Oleh karena itu, kerja sama antara pemerintah dan para pelaku kebijakan sangat diperlukan untuk menetapkan aturan yang tegas dan mudah dipahami untuk memastikan implementasi berjalan efektif serta meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penjelasan dari Operator SID, bahwasannya pelatihan terkait Website Sistem Informasi Desa dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ataupun Diskominfo belum sepenuhnya maksimal. Hal ini disampaikan oleh Mochamad Junaidi selaku Operator SID pada tanggal 11 April 2025, sebagaimana berikut:

*“Pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten kepada operator Sistem Informasi Desa (SID) belum dilaksanakan secara optimal. Pada tahap awal, kegiatan tersebut hanya berupa sosialisasi atau himbauan, tanpa disertai dengan praktik penggunaan langsung. Oleh karena itu, operator SID di Desa Kendalpecabean terpaksa belajar secara mandiri melalui YouTube dan bantuan dari pengkat desa lainnya”.*



**Gambar 5.** Dokumentasi Pelatihan SID

Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Konsistensi dalam penerapan aturan merupakan faktor penting bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Maka, penting bagi para pembuat dan pelaksana kebijakan untuk bekerja sama dalam merumuskan aturan yang jelas dan selaras dalam menjalankan program. Dalam pelaksanaannya, program SID perlu didukung dengan kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi yang terstruktur serta pelatihan secara rutin, agar para pelaksana memiliki pemahaman yang tepat mengenai prosedur dan ketentuan penggunaan website SID.

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, ditemukan sejumlah temuan pada dimensi komunikasi terkait Implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, seperti pada indikator transmisi sudah berjalan dengan baik. Sedangkan pada indikator kejelasan dijumpai bahwa tidak semua para pelaksana kebijakan memahami terkait fitur-fitur yang ada didalam SID. Selanjutnya, pada indikator konsistensi juga belum maksimal karena kurangnya pelatihan atau bimbingan teknis (Bimtek) oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo maupun Diskominfo Sidoarjo.

### Sumber Daya

Sumber daya merupakan elemen penting untuk mendukung operasional suatu organisasi. Ketersediaan sumber daya serta penempatannya dalam pelaksanaan kebijakan memiliki peran yang sangat penting, sebab kekurangan atau tidak optimalnya sumber daya bisa mengakibatkan kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan. Menurut George C. Erward III yang dikutip oleh Deddy Mulyadi (2018:68), meskipun suatu kebijakan telah disampaikan dengan jelas dan konsisten, implementasinya tetap tidak akan berjalan secara efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan. Dengan demikian, diperlukan berbagai upaya untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia, alokasi anggaran, fasilitas fisik, informasi atau data yang akurat, serta jaringan yang memadai dalam proses pelaksanaan kebijakan. Dengan melihat pada beberapa elemen berikut:

#### 1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimaknai sebagai kapasitas dan kualitas individu yang menjalankan tugas dalam implementasi kebijakan publik di Desa Kendalpecabean. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan sangat bergantung pada adanya staf yang berkompeten. Jika para pelaksana kebijakan tidak berkompeten atau jumlahnya tidak mencukupi, maka efektivitas implementasi kebijakan bisa terhambat. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Mochamad Junaidi selaku Operator SID mengungkapkan:

*"operator SID di Desa Kendalpecabean terdiri dari dua orang, namun hanya satu yang sepenuhnya memahami pengelolaan dan perawatan SID, selain itu juga bertugas sebagai admin utama SID didesa ini. Satu operator lainnya lebih fokus pada penginputan data karena pemahaman mereka yang terbatas".*

Staf yang terampil dan memiliki pemahaman yang cukup mengenai Sistem Informasi Desa (SID) akan sangat berkontribusi dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan kebijakan di desa tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memberikan pelatihan kepada staf agar mereka dapat memperoleh keterampilan dan pengetahuan

yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas mereka dengan optimal, sehingga kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.

**Tabel 2.** Daftar Pengelola Website Sistem Informasi Desa

Nama	Jabatan	Keterangan
Mochamad Junaidi	Kaur Perencanaan	Admin Utama SID
Khusen	Kasi Pemerintahan	User/Pengguna SID

Sumber : Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

Merujuk pada data yang disajikan dalam tabel 3, dapat dilihat bahwa pengelola website Sistem Informasi Desa (SID) dilakukan oleh dua orang perangkat desa yang dalam tugas, pokok dan fungsinya tidak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan dan umum. Namun berdasarkan keterangan yang diperoleh, Mochamad Junaidi yang menjabat sebagai Kaur Perencanaan dan bertindak sebagai admin utama Sistem Informasi Desa (SID), dinilai memiliki kompeten dalam pengelolaan dan perawatan SID. Adapun Khusen yang menjabat sebagai Kasi Pemerintahan berperan sebagai user atau pengguna Sistem Informasi Desa (SID) yang turut membantu dalam proses penginputan data.

## 2. Sumber Daya Non-Manusia

Selain sumber daya manusia, Pemerintah Desa Kendalpecabean juga menganggarkan dana setiap tahunnya untuk pengelolaan website Sistem Informasi Desa (SID), yang mencakup pemeliharaan dan perpanjangan layanan hosting dan domain yang berkaitan dengan website SID milik desa. Namun demikian, anggaran tersebut tidak mencakup pemberian honor bagi pengelola website.

**Tabel 3.** Anggaran Website SID Desa Kendalpecabean

Tahun	Anggaran	Sumber Dana
2024	Rp. 2.000.000,-	Dana Desa
2023	Rp. 3.293.962,-	Dana Desa
2022	Rp. 3.000.000,-	Dana Desa

Sumber: Kaur Keuangan Desa Kendalpecabean, 2025

Berdasarkan data pada tabel diatas, dapat diketahui bahwa pengelolaan website Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean telah mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai dengan kenutuhan, seperti untuk biaya memperpanjang hosting atau domain. Pernyataan ini disampaikan oleh Kaur Perencanaan Desa Kendalpecabean, Mochamad Junaidi, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025:

*"Pengelolaan SID di Desa Kendalpecabean saat ini hanya sebatas pada pemeliharaan, seperti pembaruan hosting yang dianggarkan setiap tahunnya. Insentif tambahan bagi operator SID tidak diperbolehkan karena sudah termasuk dalam tupoksi perangkat desa. Ke depan, direncanakan penganggaran untuk Ketua RT yang telah membantu dalam updating data, dengan catatan melalui musyawarah dan ketersediaan anggaran".*

Selain sumber daya manusia dan anggaran, fasilitas pendukung seperti sarana dan prasarana juga diperlukan untuk menunjang pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean. Sebagai admin SID, kebutuhan fasilitas yang meliputi jaringan internet dan komputer

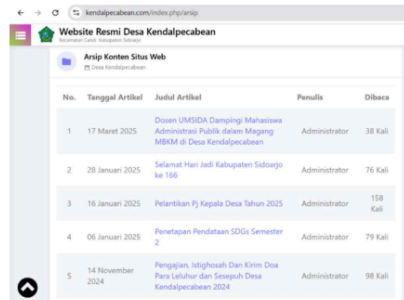
sangat penting untuk mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Fasilitas yang lengkap dapat memperlancar pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan efisiensi serta epektifitas pekerjaan. Pernyataan ini didukung oleh Moch. Junaidi Junaidi, selaku admin utama SID, dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025:

*"Pada saat itu, komputer dan printer yang rusak dianggarkan untuk mendukung program SID. Seiring peningkatan ke sistem online, dibutuhkan server dan hosting, sehingga bendahara desa mengalokasikan anggaran dan meminta persetujuan Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kalau internet sudah tersedia sejak lama, namun baru-baru ini kecepatannya ditingkatkan lagi".*

Hasil observasi di lapangan menunjukkan bahwa dimensi sumber daya telah terpenuhi dengan optimal. Hal ini tercermin dari tersedianya sumber daya manusia, alokasi anggaran, serta sarana dan prasarana yang mendukung implementasi Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo.

#### Disposisi

Sikap pelaksana merupakan salah satu faktor penting yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Sifat-sifat penting yang sebaiknya dimiliki oleh implementor antara lain kejujuran serta komitmen yang kuat. Pernyataan tersebut sejalan dengan pendapat George C. Erward III yang dikutip dalam karya Deddy Mulyadi (2018:68), bahwa disposisi merujuk pada sifat atau karakter yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis.



The image shows a screenshot of the official website of Desa Kendalpecabean. The page title is 'Website Resmi Desa Kendalpecabean'. Below the title, there is a section titled 'Artikel Konten Situs Web' with a sub-header '25 Desa Kendalpecabean'. A table lists several articles with columns for 'No.', 'Tanggal Artikel', 'Judul Artikel', 'Penulis', and 'Dibaca'. The articles listed are:

No.	Tanggal Artikel	Judul Artikel	Penulis	Dibaca
1	17 Maret 2025	Dosen UMSIDA Dampingi Mahasiswa Administrasi Publik dalam Magang MBKM di Desa Kendalpecabean	Administrator	38 Kali
2	28 Januari 2025	Selamat Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo ke 156	Administrator	76 Kali
3	16 Januari 2025	Pelantikan Pj Kepala Desa Tahun 2025	Administrator	158 Kali
4	06 Januari 2025	Penetapan Pendataan SIDG Semester 2	Administrator	79 Kali
5	14 November 2024	Pengajian, Istighosah Dan Kirin Dua Para Leluhur dan Seseputi Desa Kendalpecabean 2024	Administrator	98 Kali

**Gambar 6.** Halaman Menu Artikel Sistem Informasi Desa (SID) Desa Kendalpecabean  
Sumber: [www.kendalpecabean.com](http://www.kendalpecabean.com), 2025

Berdasarkan gambar diatas, dalam pelaksanaan SID di Desa Kendalpecabean, operator SID menunjukkan komitmen tinggi terhadap kejujuran. Hal ini terlihat dari sikap operator yang juga berperan sebagai penyusun berita, yang selalu menyampaikan informasi atau laporan berdasarkan fakta yang sebenarnya tanpa melakukan manipulasi data. Sementara itu, tingginya komitmen dari para pelaksana kebijakan akan mendorong mereka untuk menjalankan tugas, wewenang, fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 11 April 2025, Mochamad Junaidi selaku operator SID mengungkapkan:

*"Komitmen awal perangkat desa (operator SID) untuk menjaga data agar tidak hilang dan dapat berkelanjutan sesuai fungsinya. Biasanya terkait*

*updating data dilakukan pada hari Minggu atau waktu senggang, berupa pengecekan data dan penginputan kegiatan yang sudah dilakukan oleh desa yang kemudian diunggah sebagai artikel berita”.*

Dari pernyataan tersebut dapat terlihat adanya kesediaan dan komitmen dari parapelaksana kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean untuk meluangkan waktu diluar jam kerja guna melakukan pembaruan data pada situs web SID. Selain itu Mochamad Junaidi selaku perangkat desa juga menambahkan:

*“Sosialisasi dilakukan dalam setiap rapat serta melalui grup Whatsapp lembaga. Selain itu, seluruh lembaga desa juga diajak untuk berkolaborasi dalam upaya membangun desa agar lebih maju, khususnya melalui perangkat pendukung yang berkaitan dengan SID”.*

Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari perangkat desa untuk menjaga keberlangsungan Sistem Informasi Desa (SID), dengan mengajak seluruh pihak terkait untuk berkolaborasi secara aktif. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa dimensi disposisi telah terlaksana dengan baik. Hal ini tercermin dari sikap jujur yang ditunjukkan oleh Operator SID dalam menyampaikan informasi sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu, juga terlihat adanya komitmen yang kuat dari perangkat desa untuk terus menjaga keberlangsungan Sistem Informasi Desa (SID).

#### **Struktur Birokrasi**

Salah satu aspek penting yang menentukan keberhasilan pelaksana kebijakan Sistem Informasi Desa (SID) adalah struktur birokrasi. Struktur ini merujuk pada pola hubungan dan koordinasi antara lembaga pelaksana (instansi) dengan pihak yang menjalankan kebijakan. Berdasarkan teori Erward III (dalam Leo Agustino, 2016), terdapat dua karakteristik yang dapat memperkuat kinerja struktur birokrasi atau organisasi, yaitu adanya Standar Operasional (SOP) dan tingkat fragmentasi.

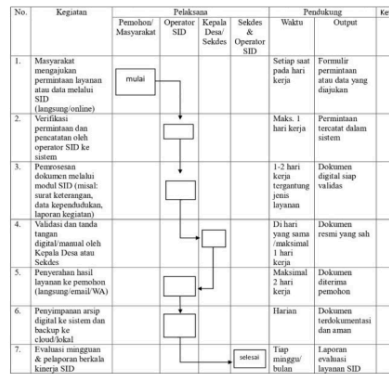
##### **1. Standar Operasional (SOP)**

Dalam pelaksanaan kebijakan, diperlukan struktur yang jelas karena struktur turut berperan penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Kejelasan standar operasional prosedural juga akan mempermudah para pelaksana dalam menjalankan kebijakan tersebut. Struktur yang baik dan jelas adalah struktur yang memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Menurut George C. Erward III dalam Mulyadi (2018:68), struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan memiliki peran yang sangat penting terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Salah satu aspek yang penting dalam setiap organisasi adalah keberadaan SOP, karena memberikan kejelasan mengenai tahapan atau alur dalam menjalankan kebijakan, khususnya terkait pengelolaan website Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean agar prosesnya berjalan secara optimal. Pada wawancara pada tanggal 11 April 2024, Operator SID Moch. Junaidi menyampaikan:

*“SOP di Desa Kendalpecabean saat ini masih terbatas pada kegiatan penginputan dan pelaporan data, serta hanya diberlakukan untuk admin utama SID. Belum ada SOP yang baku yang dirancang khusus untuk pelayanan masyarakat terkait SID, sehingga hal tersebut masih menjadi tanggung jawab yang perlu diselesaikan ke depannya”.*

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dilihat bahwa pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terkait dengan SID di Desa Kendalpecabean belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena SOP yang ada saat ini hanya ditujukan bagi para

pelaksana kebijakan, sementara SOP yang mengatur pelayanan kepada masyarakat belum terealisasi.

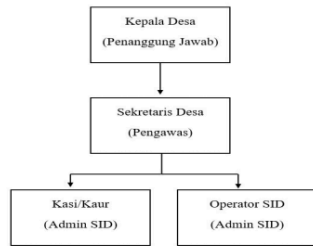


Gambar 7. SOP SID Desa Kendalpecabean  
 Sumber: Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025

## 2. Fragmentasi

Melakukan fragmentasi akan memastikan bahwa setiap aktivitas, program atau kegiatan dikelola oleh unit kerja yang sesuai dengan bidang keahliannya. Dengan demikian, pelaksanaan akan menjadi lebih optimal karena ditangani oleh pelaksana kebijakan yang memiliki kompetensi dan kapabilitas yang memadai. Struktur birokrasi yang terfragmentasi mendukung efektivitas implementasi kebijakan karena dijalankan oleh pihak-pihak yang berkompeten dan mampu. Hasil wawancara dengan Operator SID, Mochamad Junaidi pada tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:

*“Pembagian tugas telah dilakukan sesuai dengan potensi keahlian yang dimiliki. Kepala Desa sebagai penanggung jawab, Kaur Perencanaan sebagai admin utama, sedangkan operator lainnya hanya sebagai pengguna atau user”.*



**Bagan 1.** Tupoksi Pengelola SID Desa Kendalpecabean  
*Sumber Perangkat Desa Kendalpecabean, 2025*

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa pembagian tugas dalam pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean telah berjalan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan penyesuaian tugas yang telah dilakukan sesuai dengan kompetensi masing-masing perangkat desa. Meskipun dalam tugas, pokok dan fungsi (tupoksi), Kaur Perencanaan tidak bertanggung jawab atas pelayanan umum, tetapi tugasnya tetap mendukung kelancaran pengelolaan SID.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan mengenai dimensi Struktur Birokrasi menghasilkan temuan pada indikator Standar Operasional (SOP) belum dilakukan secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya SOP yang hanya berlaku untuk para pelaksana kebijakan, sementara itu belum ada SOP untuk pelayanan kepada masyarakat terkait SID. Sedangkan pada indikator fragmentasi sudah berjalan secara maksimal karena pembagian tugas terkait pengelolaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean sudah sesuai dengan bidang keahliannya.

#### CONCLUSION

Pelaksanaan Sistem Informasi Desa (SID) di Desa Kendalpecabean pada indikator komunikasi menunjukkan upaya yang cukup baik dalam melakukan tranmisi informasi melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Namun, masih terdapat kendala dalam hal kejelasan penyampaian, dimana belum semua pelaksana kebijakan memahami fitur-fitur yang tersedia dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu kegiatan pelatihan belum sepenuhnya konsisten, yang berakibat pada belum optimalnya proses implemetasi. Selanjutnya untuk indikator sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memahami teknis SID masih terbatas, namun telah didukung dengan alokasi anggaran dan fasilitas tekonologi seperti komputer dan jaringan yang memadai, meskipun belum disertai dengan insentif khusus bagi pengelola. Pada indikator disposisi, terlihat adanya komitmen yang kuat dari para pelaksana, khususnya operator SID. Dalam menjalankan tugasnya mereka jujur dan bertanggung jawab, bahkan diluar jam kerja sebagai bentuk dedikasi terhadap keberlangsungan SID. Terakhir, dari indikator struktur birokrasi, masih ditemukan hambatan yang berkaitan dengan belum adanya SOP yang baku untuk pelayanan kepada masyarakat terkait SID. Namun pada aspek fragmentasi, sistem pelaksanaan telah menunjukkan kinerja yang baik dengan pembagian tugas berdasarkan kompetensi masing-masing perangkat desa. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan kapasitas aparatur desa dalam mengelola teknologi informasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan

akuntabel. Implementasi SID bukan hanya sekadar penyediaan media informasi, tetapi juga instrumen strategis dalam membangun kepercayaan publik dan mewujudkan prinsip *good governance* di tingkat desa. Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada konteks lokal Desa Kendalpecabean, sehingga hasilnya tidak merepresentasikan kondisi keseluruhan desa di Kabupaten Sidoarjo atau daerah lain. Penelitian ini juga lebih menyoroti sudut pandang aparatur desa dan hasil observasi, sementara partisipasi masyarakat sebagai pengguna langsung SID belum dikaji secara mendalam. Penelitian selanjutnya disarankan untuk membandingkan implementasi SID di beberapa desa guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor keberhasilan maupun hambatan yang muncul. Selain itu, Penelitian kuantitatif mengenai kepuasan masyarakat sebagai pengguna langsung SID juga diperlukan untuk menilai sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan efektivitas dan mutu pelayanan publik di tingkat desa.

#### ACKNOWLEDGEMENTS

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Kendalpecabean, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih khusus kami sampaikan kepada Bapak Mochamad Junaidi atas partisipasi aktif dan kontribusi dalam memberikan data serta informasi yang relevan terkait penggunaan website Sistem Informasi Desa (SID). Kami juga berterima kasih kepada Ibu Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP., M.AP selaku dosen pembimbing atas bimbingan, arahan

#### REFERENCES

- [1] M. Jeddawi, A. Rahman, and M. Nawawi, "Studi Kemungkinan Perubahan Status Desa Teluk Kapuas Menjadi Kelurahan Di Kabupaten Kubu Raya," *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, vol. 3, no. 1, Jul. 2018, doi: 10.33701/jipsk.v3i1.301.
- [2] S. Sakir, A. S. Rahmatullah, and R. Sarofah, "Optimalisasi Sistem Informasi Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Di Dusun Temanggung, Jetis, Saptosari, Gunungkidul," *Warta LPM*, vol. 21, no. 2, pp. 1–5, Mar. 2019, doi: 10.23917/warta.v21i2.6567.
- [3] Lisnawati and S. Lestari, "Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bungu Aceh Besar," *PUBLISA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, vol. 4, 2019.
- [4] M. Adam and N. Nurhalimah, "Analisis Pengembangan Sistem Informasi Desa Berbasis Website di Desa Kaleok Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar," *Alhaqqa: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, vol. 4, no. 2, 2021.
- [5] Millah Nashrul, Miswanto, and Alfiniyah Cicik, "Pembuatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Menunjang Pelayanan di Desa Klangon, Madiun," *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, vol. 8, no. 1, Jan. 2023.
- [6] E. Mardinata, T. D. Cahyono, and R. Muhammad Rizqi, "Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat," *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 4, no. 1, pp. 73–81, Jun. 2023, doi: 10.38043/parta.v4i1.4402.
- [7] C. Yuono, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu," *Jurnal Pustaka Komunikasi*, vol. 6, no. 2, pp. 418–431, Sep. 2023, doi: 10.32509/pustakom.v6i2.3287.
- [8] Elsa Prisanda and Rury Febrina, "Penerapan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Berbasis Aplikasi SISPEDAL Dalam Rangka Mewujudkan Good Village Governance," *Journal of Governance Innovation*, vol. 3, no. 2, pp. 155–171, Sep. 2021, doi: 10.36636/jogiv.v3i2.723.
- [9] F. Sulistyowati and C. R. Dibyorin, "Partisipasi Warga terhadap Sistem Informasi Desa," *Jurnal ASPIKOM*, vol. 2, no. 1, p. 579, Jul. 2013, doi: 10.24329/aspikom.v2i1.34.

- [10] N. K. Nadia, Sazili, Sarmiati, and E. Arif, "Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko)," *JURNAL KOMUNIKATIO*, vol. 8, no. 1, pp. 29–42, Apr. 2022, doi: 10.30997/jk.v8i1.5642.
- [11] Aushap Amjad, Naufal Muhammad Lutfi, Nurjaman Muhammad, and Darmawan Ivan, "Pengaruh Penerapan E-Government (SPBE) Melalui Penggunaan Aplikasi 'Sakedap' Terhadap Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Smart City (Studi Kasus di Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 1, pp. 233243–243, Dec. 2023.
- [12] Aponno Elsina Huberta and Hatubessy Shirley, "Peningkatan Kapasitas Pengelola Bumdes Di Kecamatan Kairatu Dan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, vol. 03, no. <https://ejournal-polnam.ac.id/index.php/JPMJ/issue/view/50>, pp. 246–258, Dec. 2020.
- [13] Titis Ayu Angganten, "Penerapan E-Government Guna Mendukung Transparansi Dan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Tapak Kabupaten Magetan," *Jurnal Sosial Humaniora*, vol. 1, no. 2, pp. 220–229, Dec. 2024, doi: 10.70214/vyb31023.
- [14] M. H. Muntazir, T. Kushartono, and B. Septiansyah, "Implementasi Sistem Informasi Desa (Sid) Dalam Rangka Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang," *Praxis Idealis*, vol. 1, 2024.
- [15] Setyawan Arief, Rochim Achluddin Ibnu, and Kusbandrijo Bambang, "Penggunaan Sistem Informasi Desa Dalam Pelayanan Publik di Pemerintah Desa Wonokerto Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa Timur," *PRAJA observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, vol. 02, no. <https://aksiologi.org/index.php/praja/issue/view/34>, Mar. 2022.

---

**A. Cantika Alif Putri**

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur  
Email: [cantikaalifputri0@gmail.com](mailto:cantikaalifputri0@gmail.com)

**B. Ilmi Usrotin Choiriyah, S.AP, M.AP**

Fakultas Bisnis Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo  
Jl. Mojopahit No.666 B, Sidowayah, Celep, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur  
Email: [ilmiusrotin@umsida.ac.id](mailto:ilmiusrotin@umsida.ac.id)

---

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

11%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
3	<a href="http://ojs3.unpatti.ac.id">ojs3.unpatti.ac.id</a> Internet Source	1%
4	Submitted to Exeed College Student Paper	1%
5	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%
6	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://jurnal.intekom.id">jurnal.intekom.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://journal.ipb.ac.id">journal.ipb.ac.id</a> Internet Source	1%
10	<a href="http://journal.unhas.ac.id">journal.unhas.ac.id</a> Internet Source	1%
11	<a href="http://desa-waetuoepinrangkab.go.id">desa-waetuoepinrangkab.go.id</a> Internet Source	<1%
12	<a href="http://journal.umpr.ac.id">journal.umpr.ac.id</a> Internet Source	<1%
13	<a href="http://www.merdekaindonesia.com">www.merdekaindonesia.com</a> Internet Source	<1%

---

14	<a href="http://aksiologi.org">aksiologi.org</a> Internet Source	<1 %
15	<a href="http://repositori.usu.ac.id">repositori.usu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
16	Submitted to Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Student Paper	<1 %
17	Submitted to Universitas Lancang Kuning Student Paper	<1 %
18	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %
19	Submitted to Universitas Putera Batam Student Paper	<1 %
20	<a href="http://eprints.ipdn.ac.id">eprints.ipdn.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://ijppr.umsida.ac.id">ijppr.umsida.ac.id</a> Internet Source	<1 %
22	Nashrul Millah, Miswanto Miswanto, Cicik Alfiniyah. "Pembuatan Sistem Informasi Desa (SID) untuk Menunjang Pelayanan di Desa Klangon, Madiun", PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat, 2023 Publication	<1 %
23	<a href="http://ppid.kemendag.go.id">ppid.kemendag.go.id</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://rinjani.unitri.ac.id">rinjani.unitri.ac.id</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://ejournal.suryabuanaconsulting.com">ejournal.suryabuanaconsulting.com</a> Internet Source	<1 %
26	Trio Saputra, Eka Eka, Wasiah Sufi. "Pemetaan Implementasi Kebijakan Sistem Informasi	<1 %

# Desa Di Kabupaten Kuantan Singingi", Gulawentah;Jurnal Studi Sosial, 2020

Publication

---

27	Submitted to Universitas Negeri Surabaya Student Paper	<1 %
28	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	<1 %
29	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
30	irje.org Internet Source	<1 %
31	villages.pubmedia.id Internet Source	<1 %
32	Submitted to Fakultas ISIP Student Paper	<1 %
33	eprints.uad.ac.id Internet Source	<1 %
34	journal.ipm2kpe.or.id Internet Source	<1 %
35	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
36	www.scilit.net Internet Source	<1 %
37	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
38	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	<1 %
39	eprints.umsida.ac.id Internet Source	<1 %
40	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1 %

---

41	<a href="http://jurnal.umnu.ac.id">jurnal.umnu.ac.id</a> Internet Source	<1 %
42	<a href="http://library.universitaspertamina.ac.id">library.universitaspertamina.ac.id</a> Internet Source	<1 %
43	<a href="http://peraturan.bpk.go.id">peraturan.bpk.go.id</a> Internet Source	<1 %
44	<a href="http://repository.untag-sby.ac.id">repository.untag-sby.ac.id</a> Internet Source	<1 %
45	<a href="http://www.bsm.co.id">www.bsm.co.id</a> Internet Source	<1 %
46	<a href="http://www.neliti.com">www.neliti.com</a> Internet Source	<1 %
47	Dowvi Dowvi. "Implementasi Kebijakan Layanan Pengaduan Masyarakat Secara Online di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak", JPASDEV : Journal of Public Administration and Sociology of Development, 2020 Publication	<1 %
48	Ria Hanifah, Ilmi Usrotin Choiriyah. "Implementasi Sistem Pelayanan Rakyat Sidoajo (SIPRAJA) di Desa Tambaksumur, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo", Web of Scientist International Scientific Research Journal, 2024 Publication	<1 %
49	Triana Anggun, Roni Ekha Putera, Roza Liesmana. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengurangan Risiko Bencana Banjir di Kecamatan Padang Selatan", JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik, 2020 Publication	<1 %
50	<a href="http://adoc.pub">adoc.pub</a> Internet Source	<1 %

51	<a href="https://aimos.ugm.ac.id">aimos.ugm.ac.id</a> Internet Source	<1 %
52	<a href="https://garuda.kemdikbud.go.id">garuda.kemdikbud.go.id</a> Internet Source	<1 %
53	<a href="https://repository.ub.ac.id">repository.ub.ac.id</a> Internet Source	<1 %
54	<a href="https://www.fjocotoco.org">www.fjocotoco.org</a> Internet Source	<1 %
55	Muafah Nur Romadhoni, Isnaini Rodiyah. "Efektivitas Sistem Informasi Desa dalam Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Di Desa Larangan", Sawala : Jurnal Administrasi Negara, 2025 Publication	<1 %
56	<a href="https://doku.pub">doku.pub</a> Internet Source	<1 %
57	<a href="https://text-id.123dok.com">text-id.123dok.com</a> Internet Source	<1 %

Exclude quotes  On

Exclude matches  Off

Exclude bibliography  On